

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pertanian

###### a. Pengertian Pertanian

Pengertian pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola hidupnya. Pertanian bisa diartikan sejenis proses produksi yang didasarkan atas pertumbuhan tanaman dan hewan. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam serta pembesaran hewan ternak.<sup>19</sup>

Pertanian menurut Undang-undang No 19 tahun 2013 yang berbunyi, pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

Sedangkan pengertian pertanian menurut beberapa ahli antara lain yaitu Pertanian menurut Mosher menyatakan bahwa pertanian adalah sejenis proses produksi yang khas yang didasarkan atas proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Sedangkan menurut Simatupang dan Dermoredjo pertanian tidak hanya aktivitas ekonomi untuk menghasilkan pendapatan bagi petani tetapi cara hidup sebagian besar petani.<sup>20</sup> Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanian adalah kegiatan untuk pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan bisa juga dikatakan sebagai kegiatan bercocok tanam. Pertanian sendiri mengandung dua arti yaitu pertanian dalam arti sempit dan juga arti pertanian dalam arti luas.

---

<sup>19</sup> Siti Arwati, *Pengantar Ilmu Pertanian Berkelanjutan* (Makassar: Inti Mediatama, 2018), 1.

<sup>20</sup> Yudia Azmi dkk, *Pertanian Terpadu* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), 2.

1) Pertanian dalam arti sempit

Pengolahan tanaman dan lingkungan untuk memberikan produk. Sistem ini diusahakan dalam skala kecil, dan pelakunya adalah bersifat keluarga. Adapun produk utama yang dihasilkan meliputi tanaman pokok yang dikonsumsi sehari-hari seperti beras, palawija, tanaman hortikultura. Pertanian dalam arti sempit biasanya dikerjakan di area persawahan, lading dan juga bisa di pekarangan.<sup>21</sup>

2) Pertanian dalam arti luas

Arti luas sendiri dalam pertanian dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan yang menyangkut proses produksi menghasilkan bahan-bahan kebutuhan manusia yang dapat berasal dari tumbuhan maupun hewan yang disertai dengan usaha untuk memperbaharui, memperbanyak (reproduksi) dan mempertimbangkan faktor ekonomis.<sup>22</sup>

**b. Sejarah Perkembangan Pertanian**

Sejarah Perkembangan pertanian secara relatif merupakan inovasi yang belum lama berselang bila dibandingkan dengan sejarah manusia, karena manusia semula dalam masa yang lama hanya bertindak sebagai pengumpul makanan. Adapun Perkembangan pertanian lambat laun membawa keberuntungan dan surplus pangan yang meyakinkan. Keadaan surplus demikian dapat membebaskan beberapa orang yang terampil dengan keahlian lain dari tugas memproduksi pangan. Perkembangan keahlian baru hanyalah mungkin bila kenaikan efisiensi pertanian mengizinkan penggunaan waktu-waktu senggang yang baru diperoleh. Hingga kini, keadaan semacam ini pun masih berlaku. Hasil akhir pada kenaikan taraf hidup ditandai dari hal-hal yang dulu dianggap sebagai sesuatu kemewahan pada akhirnya telah menjadi kebutuhan sehari-hari.<sup>23</sup>

Pertanian dikenal semenjak manusia memanfaatkan berbagai jenis tanaman, hewan dan ikan sebagai bahan pangan. Kepandaian tersebut meningkat karena manusia

---

<sup>21</sup> Muhammad Asir dkk, *Ekonomi Pertanian* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), 32.

<sup>22</sup> Ken Suratiyah, *Ilmu Usaha Tani* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2006), 8.

<sup>23</sup> Edi kusmiadi, *Pengantar Ilmu Pertanian Pengertian dan Sejarah Perkembangan Pertanian*, 2014.

yang berakal budi mulai mengendalikan pertumbuhan tanaman dan hewan dengan mengaturnya sedemikian rupa sehingga dapat bermanfaat langsung. Selama ini kita telah mengenal adanya perbedaan antara pertanian primitif, tradisional, semi modern, modern dan super modern. Fase-fase Perkembangan pertanian tersebut pada prinsipnya dibedakan atas dasar tingkat ilmiah dan primitif dalam penggunaan teknologi yang diterapkan.

Pertanian primitif berlangsung saat jumlah populasi manusia sangat sedikit. Setiap individu pun bebas mengumpulkan, memburu lalu meramu bahan pangan untuk melangsungkan kehidupan. Akan tetapi, sewaktu jumlah populasi manusia semakin meningkat maka yang akan terjadi adalah ketersediaan bahan pangan di alam kian terbatas. Manusia belajar dari alam bagaimana proses kejadian pertumbuhan dan perkembangan tanaman hingga menghasilkan buah dan biji. Tindakan membuang biji-bijian sisa makanan, yang tumbuh lalu berkembang dan berbuah hingga siap dikumpulkan sekaligus diramu menjadi bahan pangan merupakan suatu pengalaman awal bagi manusia untuk memulai proses budidaya tanaman. Kepandaian manusia melakukan berbagai kegiatan bertani pada fase pertanian primitif belum diwarnai dengan adanya sesuatu yang mengandung unsur ilmiah. Akan tetapi, segala tindakan bertani hanya didasarkan dengan pengalaman sehari-hari. Dalam kondisi demikian, menunjukkan fase peralihan atau pembaruan yang awalnya dari pertanian primitif secara bertahap perlahan beralih ke fase tradisional.<sup>24</sup>

Pertanian tradisional saat ini mengacu pada pengertian pertanian dalam arti sempit yaitu kegiatan bercocok tanam. Fase pertanian tradisional yang tergolong masih sangat sederhana dicirikan dari keadaan dimana pertanian sebagai pengelola usaha tani bersedia menerima kondisi tanah, curah hujan, kelembaban, iklim, varietas tanaman dengan apa adanya. Petani disini berperan sebagai penyebar biji tanaman, menjinakkan hewan dan membantu menyingkirkan atau mencegah pertumbuhan tanaman lain yang dianggap mengganggu dan merusak tanamannya dalam memperoleh air dan matahari. Secara sederhana sudah

---

<sup>24</sup> Dumasari, *Pembangunan Pertanian: Mendahulukan Yang tertinggal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 14.

dilakukan usaha perlindungan tanaman dari serangan hewan liar. Beberapa hewan tertentu yang dijinakkan secara tidak langsung dikembangkan untuk diambil manfaat atau hasil padanya. Kegiatan pertanian tradisional cenderung disesuaikan petani dengan siklus gejala alam.<sup>25</sup>

Pertanian semi modern sudah mulai menerapkan teknologi mekanisasi misalnya hand tractor untuk mengolah lahan dan alat tanam benih langsung (atabela) untuk menanam bibit padi dan jagung. Peningkatan kesuburan lahan pertanian dilakukan dengan pemakaian pupuk anorganik buatan pabrik. Sistem pengairan pun sudah diatur melalui fasilitas bendungan atau waduk. Air yang dialirkan ke lokasi lahan usaha tani secara teratur. Adapun upaya lain yang dilakukan petani dalam fase semi modern ini ialah dengan adanya reboisasi atau penghijauan kembali dan rehabilitasi lahan atau mengembalikan kesuburan lahan. Dalam fase ini juga petani mengelola usaha tani berorientasi pada pencapaian keuntungan. Prinsip petani mulai komersial dikarenakan berupaya menghemat biaya produksi untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Pertanian fase semi modern ini memiliki corak yang khas yaitu kondisi petani yang relatif aktif membentuk dan memfungsikan kelembagaan sosial ekonomi. Hal tersebut bertujuan untuk menjadikan sarana kebersamaan dalam mengembangkan pengelolaan usaha tani.<sup>26</sup>

Pertanian modern sudah mengenal penerapan teknologi yang berdasarkan prinsip ilmiah. Petani dituntut untuk menyesuaikan kemampuannya agar terampil dalam mengendalikan ragam teknologi produksi produksi. Fungsi teknologi juga tidak hanya terletak pada proses produksi melainkan juga berperan penting dalam pra maupun pasca produksi. Oleh karena itu, pertanian modern dikenal dengan kegiatan bertani padat modal. Pertanian dalam fase ini memang memiliki berbagai kemanfaatan bagi kehidupan manusia dan industri. Meskipun demikian, pertanian fase modern juga memiliki kelemahan yang muncul dari padat teknologi dan padat modal terhadap petani kecil yang

---

<sup>25</sup> Yunus Arifien dkk, *Pengantar Ilmu Pertanian* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 5.

<sup>26</sup> Teguh Soedarto, dan Rojaunnajah Kartika Ainiyah, *Teknologi Pertanian Menjadi Petani Inovatif 5.0: Transisi Menuju Pertanian Modern* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), 4.

berstatus penggarap dan buruh tani. Hal ini bisa saja menjadi ancaman karena nantinya tenaga petani digantikan dengan canggihnya teknologi seperti penyiraman, pemupukan dan pengendalian hama penyakit tanaman yang dilakukan menggunakan pemanfaatan pesawat tanpa awak atau drone. Contoh kemajuan tersebut yang berujung mengalami para petani kecil yang menyandang status penggarap memiliki resiko kehilangan pekerjaan.<sup>27</sup>

Pertanian fase super modern tidak dapat terlepas dari inovasi teknologi informasi seperti internet, program penyimpanan data pada computer, robotika dan artificial intelligence (AI) yang memiliki potensi untuk mengubah pertanian menuju generasi 4.0. Pertanian super modern yang cerdas tentu saja tidak lagi mengandalkan tenaga kerja manusia. Hanya saja, pertanian tergolong cerdas ini juga memiliki kendala yaitu dengan membutuhkan biaya yang tinggi. Perkembangan pertanian fase ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah dan investor yang saling bahu membahu membantu petani agar tetap dapat berperan dalam kegiatan on farm atau off farm. Intensifikasi berkelanjutan, ramah lingkungan dan pro petani dengan pengembangan corporate farming.<sup>28</sup>

### c. Pertanian Dalam Peradaban Islam

Sejarah memiliki peran penting dalam sebuah peradaban manusia. Sejarah peradaban Islam merupakan keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan, baik dari sisi ide, pemikiran, konsepsi, institusi dan operasionalisasi. Peradaban Islam dalam bidang pertanian dimulai sejak zaman Rasulullah. Dalam literatur sejarah Islam, kaum anshor merupakan contoh kaum yang sangat memperhatikan bidang pertanian. Rasulullah tidak pernah memerintahkan mereka untuk meninggalkan profesi tersebut. Justru meminta mereka untuk mamakmurkan dan menjadikan pertanian dan perkebunan sebagai alat perekat antara kaum Anshor dan kaum Muhajirin. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pertanian dalam pandangan Islam.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Iwan Setiawan dkk, *Pertanian Postmodern Jalan Tengah-Vertikal Generasi Era Bonus Demografi Membangkitkan Peradaban Nusantara* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2018), 66.

<sup>28</sup> Kanda Ruskandi dkk, *Transformasi Arah Tujuan Pendidikan di Era Society 5.0* (Sumedang: CV Caraka Khatulistiwa, 2021), 47.

<sup>29</sup> Kartika Sari, *Sejarah Peradaban Islam* (Bangka: Shiddiq Press, 2015), 5.

Sekiranya kita melihat keadaan sekeliling kita, bahwasanya keberadaan petani tidaklah bernilai lebih dari wujud buruh. Masyarakat modern sekarang tidaklah memperhatikan bahwasanya kerja keras petanilah yang mempunyai peran paling besar dalam kelangsungan kesejahteraan manusia, dari segi pangan terutama. Padahal sebagai khalifah di muka bumi, alangkah sudah sepatutnya manusia untuk memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada para petani, sebagaimana islam telah memuliakan petani sejak zaman dahulu, dan pertanian zaman islam sendiri pun telah menjadi sebuah corak peradaban dengan nilai tambah tersendiri yang tak mungkin terpisahkan.<sup>30</sup>

Bercocok tanam atau pertanian menjadi anjuran Nabi, karena bernilai jariah bagi pelakunya. Dari Anas bin Malik Rodhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda:

*“Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon/tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang melainkan menjadi sedekah baginya.”*<sup>31</sup>

Dari Jabir bin Abdullah Rodhiyallohu Anhu dia bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda:

*“Tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya dan tidaklah kepunyaan seorang itu dikurangi melainkan menjadi sedekah baginya.”*<sup>32</sup>

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa hadits-hadits tersebut merupakan dalil-dalil yang jelas mengenai anjuran Nabi Muhammad SAW untuk bercocok tanam, karena di dalam bercocok tanam terdapat 2 manfaat yaitu manfaat dunia dan manfaat agama. Manfaat yang bersifat Dunia (dunyawiyah) dari bercocok tanam adalah menghasilkan produksi (menyediakan bahan makanan). Maka orang-orang yang bercocok tanam telah memberikan manfaat dengan menyediakan hal-hal yang dibutuhkan

---

<sup>30</sup> Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadith Nabi, Terjemahan Muhammad Al-Baqir* (Bandung: Karisma, 1993), 50.

<sup>31</sup> Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal Ibn Asad as-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, Juz 21, Hadith no. 13553* (Muassasah Risalah, 2001), 180.

<sup>32</sup> Abu Zakariya Mahyuddin Yahya ibn Syarif an-Nawawi, *Kitab Riyadhus Shalihin* (Damaskus: Daar ibn Kathir, 2007), 64.

manusia. Sehingga hasil tanamannya menjadi manfaat untuk masyarakat dan memperbanyak kebaikan-kebaikannya. Manfaat yang bersifat agama (diniyyah) yaitu berupa pahala atau ganjaran. Sesungguhnya tanaman yang kita tanam apabila dimakan oleh manusia, binatang baik berupa burung ataupun yang lainnya meskipun satu biji saja, sesungguhnya itu adalah merupakan sedekah bagi penanamnya, sama saja apakah dia kehendaki ataupun tidak, bahkan seandainya ditakdirkan bahwa seseorang itu ketika menanamnya tidak memperdulikan perkara ini (perkara tentang apa yang dimakan dari tanamannya merupakan sedekah) kemudian apabila terjadi tanamannya dimakan maka itu tetap merupakan sedekah baginya.<sup>33</sup>

Dalam masa khilafah islamiyah pun, kegiatan pertanian merupakan salah satu daripada pekerjaan yang mulia dan amat digalakkan. Pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab beliau banyak membuat kebijakan untuk mamajukan bidang pertanian. Diantaranya adalah penggarapan lahan yang mati, pengaplingan tanah, memaksimalkan peranan pengambangan pengelolaan lahan tidur, pengelolaan lahan yang dilindungi pemerintah, pengaturan pengeksplorisasian bumi di daerah taklukan dan pengelolaan air. Umar menghimbau untuk menghidupkan lahan yang mati sebagai cara untuk mendapatkan hak milik. Politik Umar di dalam pengaplingan tanah memiliki karakteristik, diantaranya menetapkan syarat bukan milik pribadi dan tidak merugikan orang muslim atau kafir dzimmi membatasi luas tanah, menarik kembali tanah yang diberikan jika ditelantarkan oleh penerimanya. Khalifah Umar bin Khattab juga melarang bangsa arab untuk menjadi petani karena mereka bukan ahlinya. Menurutnya, tindakan memberi lahan pertanian kepada yang bukan ahlinya sama dengan perampasan hak-hak publik.<sup>34</sup>

Setelah masa Khulafaurrasyidin bidang pertanian berkembang dengan baik, sampai pada masa khalifah Daulah Abbasiyah pada masa pemerintahan Khalifah Harun Arrasyid. Dia sangat memperhatikan, membela dan

---

<sup>33</sup> Vindi Khusnul Khuluq dkk, "Perkembangan Pertanian Dalam Peradaban Islam: Telaah Historis Kitab Al Filaha Ibnu Awwam," *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* No. 1 (2020): 85.

<sup>34</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khattab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 464.

menghormati kaum tani dengan meringankan pajak hasil bumi dan bahkan ada yang dihapuskan.<sup>35</sup> Beberapa usaha untuk mendorong kaum tani agar maju diantaranya:

- 1) Memperlakukan ahli zimmah dan mawaly dengan perlakuan baik dan adil, serta menjamin hak milik dan jiwa mereka, hingga bertani di seluruh penjuru negeri.
- 2) Mengambil tindakan keras terhadap para pejabat yang berlaku kejam terhadap petani.
- 3) Memperluas daerah-daerah pertanian.
- 4) Membangun dan menyempurnakan perhubungan ke daerah-daerah pertanian, baik darat maupun air.
- 5) Membangun bendungan-bendungan dan kanal-kanal.<sup>36</sup>

## 2. Pupuk Subsidi

### a. Kebijakan Pupuk Subsidi

Pupuk merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam tanah untuk menyediakan unsur-unsur esensial bagi pertumbuhan tanaman. Definisi pupuk bersubsidi diuraikan pada Pasal 1 angka 1 Permendagri No 15/M-DAG/PER/4/2013 mengenai Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi guna Sektor Pertanian, yakni seperti di bawah ini:

“Pupuk Bersubsidi ialah barang dalam pengawasan yang pengadaan serta penyalurannya memperoleh subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian mencakup atas pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK serta jenis pupuk bersubsidi yang lain yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan Pemerintah pada bidang pertanian.”<sup>37</sup>

Subsidi merupakan upaya pemerintah melalui penyaluran anggaran kepada produsen barang dan jasa dalam rangka pelayanan publik sehingga masyarakat dapat memenuhi hajat hidupnya dengan harga beli yang lebih terjangkau atas barang dan jasa publik yang disubsidi tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa subsidi adalah bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada produsen dan konsumen suatu bisnis atau sektor ekonomi atas barang atau jasa tertentu. Adapun tujuan utama subsidi pupuk adalah agar harga pupuk di tingkat petani dapat tetap terjangkau oleh

<sup>35</sup> A. Hasyimi, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 239.

<sup>36</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 239.

<sup>37</sup> Danu Bagus Pratama, “Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Ekonomi,” No. 2, *Jurnal Rechtsens* (2020): 199.



petani, sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas petani, dan mendukung program ketahanan pangan.<sup>38</sup>

Kebijakan subsidi pupuk bersifat dinamis sesuai dengan kondisi lingkungan strategis. Namun, esensi dari kebijakan subsidi pupuk sejak tahun 1969 tetap sama, yaitu mendorong produktivitas dan produksi pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani. Sejak itu, subsidi pupuk terus diberikan dalam bentuk harga eceran tertinggi atau HET. Dalam mengimplementasikan kebijakan subsidi pupuk, dibangun suatu sistem distribusi pupuk secara nasional, dari produsen sampai petani. Kebijakan subsidi pupuk memiliki dampak negatif dan dampak positif. Subsidi pupuk ternyata menimbulkan dampak negatif baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Dampak negatif yang cukup menonjol antara lain:

- 1) Subsidi pupuk menimbulkan dua jenis dualisme pasar, yang pertama dualisme antara pasar pupuk bersubsidi dengan HET dan pasar pupuk nonsubsidi yang mengikuti mekanisme pasar, dan yang kedua yaitu dualisme antara pasar domestik dan pasar internasional.
- 2) Penggunaan pupuk berlebihan.
- 3) Industri pupuk tidak berkembang secara optimal.
- 4) Biaya lebih besar dari pada manfaat.

Di samping menimbulkan dampak negatif, kebijakan subsidi pupuk juga berdampak positif terhadap pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani. secara umum subsidi pupuk berdampak positif antara lain:

- 1) Peningkatan modal petani.
- 2) Pengembangan pasar pupuk yang sebelumnya belum berfungsi sehingga menekan biaya distribusi.
- 3) Peningkatan produktivitas petani.
- 4) Perbaikan pendapatan usaha tani.<sup>39</sup>

Disamping adanya sisi negatif dan positif dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah memiliki keinginan yang kuat untuk membantu para petani agar mudah mendapatkan pupuk bersubsidi. Dengan adanya pupuk bersubsidi tersebut, para petani diharapkan dapat berusaha

---

<sup>38</sup> Dungtji Munawar, *Memahami Pengertian Dan Kebijakan Subsidi Dalam APBN*, (Cmahi: Widyaiswara Utama BDK, 2013), 15.

<sup>39</sup> Wayan R. Susila, "Kebijakan Subsidi Pupuk: Ditinjau Kembali," *Jurnal Litbang Pertanian*, No. 2 (2010): 46.

tani dengan baik dengan capaian produksi yang meningkat setiap musimnya. Dengan melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, diharapkan kebijakan subsidi pupuk dapat mendorong pendapatan dan juga bisa menjamin kesejahteraan petani. Pemerintah juga telah mengalokasikan dana yang besar untuk adanya pelaksanaan pupuk bersubsidi ini. Dalam kurun waktu 2015-2015 subsidi pupuk yang tertuang dalam APBN berkisar Rp 25,3 triliun sampai Rp 31,3 triliun.<sup>40</sup>

#### **b. Kelangkaan Pupuk Subsidi**

Kelangkaan pupuk ternyata tidak disebabkan oleh volume produksinya saja, tetapi juga diakibatkan oleh konsumsinya yang melebihi dosis anjuran. Selain itu kelangkaan pupuk disebabkan juga oleh perencanaan luas tanam yang tidak baik, serta penggunaan lahan secara intensif. Ada empat hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan pupuk yaitu:

- 1) Tepat jenis, yaitu memilih kombinasi jenis pupuk berdasarkan komposisi unsur hara utama dan tambahan berdasarkan sifat kelarutan, sifat sinergis dan antagonis antar unsur hara dan sifat tanahnya.
- 2) Tepat waktu dan frekuensi yang ditentukan oleh iklim atau CH, sifat fisik tanah dan logistik pupuk.
- 3) Tepat cara, yaitu cara pemberian yang ditentukan berdasarkan jenis pupuk, umur tanaman dan jenis tanah.
- 4) Tepat dosis, yaitu dosis pupuk yang diperlukan berdasarkan analisis status hara tanah dan kebutuhan tanaman.<sup>41</sup>

Apabila kita bisa menganjurkan pemakaian pupuk sesuai dengan status hara tanah, maka efisiensi konsumsi pupuk akan menghasilkan peningkatan pendapatan sekaligus ikut memelihara lingkungan. Banyak cara yang bisa dilakukan dalam memperbaiki perilaku konsumen pupuk (petani) terhadap cara penggunaan pupuk, antara lain dengan cara mengubah teknologi penggunaan pupuk dengan penerapan teknologi pupuk hayati (bio fertiliser). Karena riset menunjukkan bahwa penggunaan teknologi pupuk

---

<sup>40</sup> Abdul Halim, *Kartu Tani dan Pupuk Bersubsidi Kajian Pemanfaatan Pada Kelompok Tani di Kabupaten Maros* (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2023), 3.

<sup>41</sup> Benny Rachman, "Kebijakan Subsidi Pupuk: Tinjauan Terhadap Aspek Teknis, Manajemen Dan Regulasi," *Analisis Kebijakan Pertanian* No. 2, (2009): 140.

tersebut mampu meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk kimia tunggal maupun majemuk hingga 100 persen. Jika teknologi pupuk hayati ini bisa diterapkan maka konsumsi pupuk urea yang mencapai 5,9 juta ton tahun 2006 dapat diturunkan menjadi 4,5 juta atau bisa dihemat 1,4 juta ton (23,7%).<sup>42</sup>

Penyebab Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Hampir di setiap daerah di Indonesia masih banyak petani dijumpai dengan permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi. Kelangkaan pupuk bersubsidi sudah menjadi permasalahan yang sangat serius, yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat ada berbagai faktor penyebab yang terdapat didalamnya yaitu:

- 1) Usulan Pupuk Bersubsidi Sesuai e-RDKK Lebih Tinggi dari Realisasi Pupuk bersubsidi yang diusulkan tidak sebanding dengan alokasi atau realisasi pupuk yang ditetapkan pemerintah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan pupuk petani. Jadi, salah satu yang menyebabkan tingkat realisasi pupuk subsidi rendah adalah karena adanya pengurangan jatah pupuk subsidi oleh pemerintah pusat. Pengurangan jatah pupuk subsidi oleh pemerintah itu disebabkan oleh berkurangnya anggaran untuk pupuk bersubsidi.
- 2) Pola Distribusi Pupuk Pendistribusian pupuk bersubsidi menjadi salah satu penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi dikarenakan keefektifannya sangat diperhatikan. Dalam pelaksanaan di lapangan kelompok tani maupun kios pengecer belum melaksanakan pendistribusian pupuk dengan efektif dikarenakan pembelian pupuk subsidi yang dilakukan petani tidak pada kios resmi yang sudah ditetapkan wilayah kerjanya. Banyaknya petani yang masih membeli pupuk pada kios pengecer bukan kepada distributor dikarenakan jarak antara tempat tinggal petani dengan kios resmi yang tergolong jauh sehingga membutuhkan biaya dan tenaga yang lebih jika membeli di kios resmi, selain itu ketersediaan pupuk subsidi di kios resmi menyebabkan petani lebih memilih membeli pada kios pengecer lainnya untuk memenuhi kebutuhan pupuk pada tanaman

---

<sup>42</sup> Valeriana Darwis Dan Saptana, "Rekonstruksi Kelembagaan Dan Uji Tekonologi Pemupukan: Kebijakan Startegis Mengatasi Kelangkaan Pupuk," No. 2, (2010): 170.

padinya. Tentunya jika para petani membeli pupuk subsidi tidak pada kelompok taninya masing-masing atau tidak pada kios resmi sesuai wilayah kerjanya hal ini akan berdampak pada berkurangnya ketersediaan pupuk pada masing-masing kios pengecer lainnya. Secara singkat diketahui bahwasanya penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi yaitu kebijakan pupuk bersubsidi yang belum efektif dikarenakan masih banyak ditemukan petani yang membeli pupuk bersubsidi tidak pada pengecer resmi.<sup>43</sup>

Salah satu tujuan program pupuk bersubsidi dari pemerintah adalah untuk membayar sebagian harga beli pupuk petani, sehingga dapat dijangkau oleh petani. Namun pada kenyataannya keberadaan pupuk bersubsidi tidak dapat memenuhi kebutuhan pupuk petani. Akibatnya petani membeli pupuk yang bukan berasal dari program pemerintah atau pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih tinggi. Keberadaan pupuk bersubsidi dapat membantu petani dalam meningkatkan pendapatan usaha taninya. Ketika terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, maka para petani akan beralih pada pupuk non subsidi yang sangat mahal, sehingga para petani akan memperoleh modal yang cukup banyak untuk biaya pupuk. Sehingga menyebabkan petani untuk pemakaian pupuk non subsidi yang memiliki harga tinggi daripada pupuk subsidi. Adapun harga pupuk non subsidi berjenis urea sebesar 8.500/kg, sedangkan untuk harga pupuk NPK sendiri sebesar Rp 10.000/kg. Jika dibandingkan dengan harga pupuk subsidi tentunya sangat jauh berbeda yang mana harga subsidi hanya berkisar antara Rp 2.300/kg untuk NPK dan Rp 2.250/kg untuk Urea.<sup>44</sup>

### c. Solusi Dari Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

Upaya untuk mengatasi kelangkaan pupuk antara lain ialah pemanfaatan bahan organik, dan penggunaan pupuk hayati. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri atas bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan mensuplai

---

<sup>43</sup> Tria Maulina dkk, “Analisis Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Untuk Petani Padi (Studi Kasus Dusun VIII Desa Pematang Setrak kecamatan teluk Mengkudu),” *Jurnal of Laguna Geography*, No. 1, (2023): 20.

<sup>44</sup> Febby Dany Lestary, M Yasin, “Analisis Dampak Kelangkaan Pupuk Terhadap Pendapatan Petani Padi Di Desa Kacangan Kabupaten Lamongan,” *JRIME: Jurnal Riset Manajemen dan Ekonomi*, No. 4, (2023): 57.

bahan organik untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, sisa panen (jerami, brangkas, tongkol jagung, bagas tebu, dan sabut kelapa), limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian, dan limbah kota. Penggunaan pupuk organik bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk kimia, sehingga dosis pupuk dan dampak pencemaran lingkungan akibat penggunaan pupuk kimia dapat secara nyata dikurangi. Lebih lagi kemampuannya untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan terbukti sejalan dengan kemampuannya menurunkan dosis penggunaan pupuk kimia. Salah satu jenis pupuk organik adalah kompos yang berasal dari sampah kota. Adapun Pupuk hayati adalah inokulan yang mengandung mikroorganisme hidup untuk meningkatkan kesuburan tanah dan kualitas hasil tanaman. Pupuk hayati dapat meliputi mikroba penambat nitrogen, mikroba pelarut fosfat, mikroba pemantap agregat, mikroba penghasil zat perangsang tumbuh, fungi mikoriza.<sup>45</sup>

Solusi yang ditawarkan berupa pengolahan limbah organik pertanian menjadi eco enzyme sebagai solusi kelangkaan pupuk bersubsidi bagi petani. Proyek ini merupakan penerapan hasil studi di bidang lingkungan. Eco enzyme adalah ekstrak cairan yang dihasilkan dari fermentasi sisa sayuran dan buah-buahan dengan substrat gula merah. Prinsip proses pembuatan eco enzyme sebenarnya mirip proses pembuatan kompos, namun ditambahkan air sebagai media pertumbuhan sehingga produk akhir yang diperoleh berupa pupuk cair. Terdapat beberapa kelebihan penggunaan eco enzyme sebagai pupuk pertanian dibandingkan pupuk organik kompos dan pupuk kimia, yaitu mempercepat pertumbuhan tanaman sehingga meningkatkan produktivitas pertanian, proses fermentasi menghasilkan gas O<sub>3</sub> yang segar dan sangat baik untuk lingkungan, tanaman aman dikonsumsi karena tidak mengandung bahan kimia berbahaya, proses pembuatan yang mudah dan tanpa memerlukan biaya yang

---

<sup>45</sup> Nana Danapriatna, "Fenomena Kelangkaan Pupuk Kimia dan Alternatif Solusinya," *Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Wilayah*, No. 1, (2009): 6.

besar, serta meningkatkan kandungan zat hara, mineral, dan kesuburan pada tanah.<sup>46</sup>

### 3. Kartu tani

Kartu tani ialah kartu yang diterbitkan oleh pihak perbankan kepada petani untuk dimanfaatkan kegunaannya sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin EDC (Electronic Data Capture) di pengecer resmi sebagai upaya menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi dan tepat sasaran kepada petani yang berhak menerimanya.<sup>47</sup>

Kartu Tani merupakan kartu debit tabungan multi fungsi yang terintegrasi dengan SIMPI (Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia). Kartu Tani tersebut dapat digunakan petani untuk transaksi jasa keuangan secara umum dan dapat juga dimanfaatkan untuk pembelian pupuk subsidi. Terlebih dari itu kartu tani juga bisa untuk mengakses pendistribusian bantuan dan edukasi pemerintah, serta berbagai informasi seperti harga saprotan dan komoditi serta stok pupuk bersubsidi diberbagai wilayah. Kementerian Pertanian yang mengagas program kartu tani diharapkan dapat mengefisienkan pupuk bersubsidi dalam pendistribusiannya, dengan sasaran pemberian bantuan pupuk bersubsidi yakni petani-petani kecil sebagai tujuan akhir program kartu tani ini.<sup>48</sup>

Salah satu tujuan program kartu tani yaitu meliputi mengurangi kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, dan mengawasi suatu program yang bertujuan mendukung kesejahteraan petani.<sup>49</sup> Pendekatan dalam Islam menjelaskan upaya untuk mengurangi kemiskinan idealnya melibatkan pendekatan yang komprehensif yaitu meningkatkan tingkat pendapatan dengan berpihak pada masyarakat miskin. Mencapai pemerataan pembayar distribusi pendapatanserta memberikan kesempatan yang sama bagi semua segmen sosial. Adapun kendala terpenting yang dihadapi masyarakat miskin untuk keluar

---

<sup>46</sup> Widya Prarikeslan dkk, "Pengelolaan Limbah Organik Petani Untuk Mengatasi Kelangkaan pupuk Bersubsidi," *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, No. 1 (2023): 104.

<sup>47</sup> Zainal Arifin dkk, "Pemupukan Spesifik Lokasi Pada Tanaman Padi, Jagung, dan Kedelai di Jawa Timur" (Malang: UMMPress, 2022), 17.

<sup>48</sup> Riki dkk, "Implementasi Kebijakan Prgram Kartu Tani untuk Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Pakis Jaya Kabupaten Karawang Tahun 2021," *Journal of law, Administration and social science*, No. 2, (2022): 123.

<sup>49</sup> Fajar Makhmudi Ismail, *Analisis Efektivitas Program Kartu Tani Terhadap Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Petani Cililibur Paguyangan)*, (Purwokerto, UIN SAIZU 2023), 22.

dari kemiskinan ialah kurangnya akses terhadap kredit untuk menjalankan usaha mereka sendiri.<sup>50</sup>

Penggunaan Kartu Tani juga memiliki tujuan sebagai alat transaksi untuk penebusan pupuk bersubsidi antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani.
- b. Terwujudnya distribusi pupuk bersubsidi yang sesuai dengan Asas 6 (enam) Tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga).
- c. Upaya mewujudkan kegiatan pendistribusian, pengendalian, dan pengawasan pupuk bersubsidi yang terintegrasi.
- d. Meningkatkan pemberian layanan perbankan bagi petani untuk memperoleh akses pembiayaan dari perbankan.
- e. Meningkatkan literasi digital pelayanan perbankan bagi petani.<sup>51</sup>

Tujuan dari program kartu tani bagi masyarakat adalah sebagai sarana akses layanan perbankan terintegrasi untuk mewujudkan pendistribusian pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. Tujuan untuk mencapai program kartu tani secara menyeluruh terdapat tahap-tahap pelaksanaan program kartu tani antara lain:

- a. Sosialisasi Program Kartu Tani

Sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan gambaran umum program beserta tata cara program. Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi diharapkan dapat tersampaikan dengan baik sehingga masyarakat mampu menerima dan melaksanakan program yang ditentukan sebelumnya.

- b. Pendataan dan Verifikasi Data

Pendataan dan verifikasi data merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang nantinya akan dimasukkan pada sistem SIMPI (Sistem Manajemen Pangan Indonesia). Data yang diperoleh ketika proses pendataan bersumber dari RDKK (Rencana Definitif

---

<sup>50</sup> Wahibur Rokhman, "Pengaruh Keuangan Mikro Islam Terhadap Pengentasan Kemiskinan: Studi Di Indonesia," *Tinjauan Ekonomi: Jurnal Ekonomi Bisnis*, (2013): 24.

<sup>51</sup> Imam Suahyo dkk, "Implementasi Program Kartu Tani terhadap Ketersediaan Pupuk 2021 di Desa Tegalmojo, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo," *Journal of Innovation Research and Knowledge*, No. 4, (2022), 1058.

Kebutuhan Kelompok) yang telah disusun oleh masing-masing kelompok tani. Penyuluh BPP melakukan pendataan secara lapangan sehingga memperoleh luas lahan, komoditas, jenis pupuk, serta data pribadi masing-masing petani berdasarkan data RDKK yang telah disusun oleh kelompok tani sebelumnya. Keberadaan penyuluh di setiap wilayah binaan berperan penting dalam proses pendataan karena setiap penyuluh akan melakukan pertemuan yang telah dijadwal sebelumnya dan akan mendata per kelompok sebelum nantinya dimasukkan atau di entry pada sistem oleh admin. Proses pendataan selain mendata nama pemilik atau petani, juga mewajibkan anggota kelompok tani untuk mengumpulkan berkas persyaratan seperti fotocopy ktp, kartu keluarga, dan sppt.

c. Penggunaan Kartu Tani

Kartu tani yang telah dibagikan sebelumnya pada petani dapat dimanfaatkan dalam kegiatan transaksi pembelian pupuk, selain itu juga berfungsi sebagai alat untuk transaksi kebutuhan sehari-hari. Pembelian pupuk bersubsidi dengan kartu tani dapat dilakukan pada kioski yang telah ditunjuk secara resmi oleh pemerintah dengan menunjukkan kartu tani yang dimiliki kemudian penjual akan menggesek di mesin EDC, jika terdapat kecocokan dalam data alokasi pupuk dengan mesin EDC maka terjadilah transaksi jual beli pupuk.<sup>52</sup>

Manfaat kartu tani menurut Biro Infrastruktur dan Sumber daya alam antara lain:

- a. Bagi pemerintah Pemerintah memiliki database petani yang tersaji lebih akurat dan terintegrasi, mengetahui informasi luas lahan pertanian per komoditas per wilayah, kebijakan berdasarkan informasi perkiraan hasil panen, menyalurkan subsidi dan bantuan sosial lainnya lebih tepat sasaran.
- b. Bagi petani Kartu tani memberikan banyak manfaat untuk para petani. Di antaranya memperoleh kemudahan mendapatkan pupuk bersubsidi, kemudahan menjual hasil panen tanpa perantara oleh off taker. Kemudian, mendapatkan kemudahan akses pembiayaan (KUR) bank BRI dan kemudahan mendapatkan sertifikasi tanah melalui 13 skema Prona dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

---

<sup>52</sup> Mutiara Latifa Ashari dkk, "Analisis Efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro," 12.



Selain itu, bisa mendapatkan kemudahan subsidi dari program-program yang dijalankan Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Sosial.

- c. Bagi pihak ketiga Pihak ketiga mendapat informasi perkiraan jadwal panen (per komoditas dan sebaran wilayah), penyediaan anggaran serapan hasil panen, informasi untuk penyediaan gudang dan penanganan pasca panen, informasi kebutuhan pupuk beserta sebaran wilayahnya, distribusi pupuk lebih akurat dan sesuai 6 tepat (jumlah, waktu, tempat, mutu, jenis, sasaran), mempermudah manajemen stok dan perkiraan produksi pupuk, kemudahan transaksi pembayaran hasil panen kepada petani melalui sistem pembayaran yang terintegrasi.<sup>53</sup>

Dalam pelaksanaan program kartu tani pastinya memiliki problematika. Adapun nantinya akan dijelaskan beberapa faktor yang menjadikan problematika dari program tersebut antara lain:

- a. Komunikasi

Pelaksanaan program kartu tani dapat optimal memberikan output dan outcome yang sesuai dengan tujuan kebijakan apabila ukuran, tujuan, serta upaya mencapai tujuan tersebut dapat dipahami oleh pelaksana kebijakan. Tujuan kebijakan perlu disampaikan kepada pelaksana kebijakan agar tidak adanya perbedaan orientasi dari setiap pelaksana dalam mencapai tujuan tersebut. Proses penyampaian tujuan kebijakan dilakukan melalui proses komunikasi yang optimal, tepat dan strategis. Proses komunikasi tersebut dilaksanakan dengan berbagai sosialisasi program kartu tani sehingga terjadi transfer informasi antara pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.

- b. Sumber Daya

Variabel selanjutnya dalam suatu implementasi kebijakan yang berperan penting adalah ketersediaan sumberdaya-sumberdaya penunjang. Ketersediaan sumberdaya penunjang menjadi suatu kebutuhan yang penting karena akan berpengaruh pada optimalisasi implementasi kebijakan tersebut. Sebagus apapun konseptual kebijakan dan kemampuan sumberdaya manusia tetapi jika tidak didukung ketersediaan sumberdaya penunjang maka implementasi

---

<sup>53</sup> Ajeng Galih Nurlestari, "Persepsi Petani Padi Terhadap program Kartu Tani di Kecamatan Cisayong", 2019.

tidak akan maksimal. Sumberdaya-sumberdaya penunjang akan memberikan dampak pada kemampuan dan motivasi pelaksana kebijakan maupun kepada kelompok sasaran untuk memberikan apresiasi positif terhadap program kartu tani.

c. Disposisi

Kecenderungan sikap atau karakteristik penerimaan pelaksana kebijakan akan berpengaruh dengan upaya-upaya mewujudkan tujuan kebijakan. Disposisi berkaitan dengan karakter baik dalam bentuk kejujuran maupun komitmen terhadap tanggungjawab. Hal tersebut yang akan mempengaruhi motivasi pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan. Sikap yang dibentuk oleh pelaksana kebijakan atau implementor dapat berupa sikap positif seperti bentuk dukungan atau sikap negatif seperti keapatisan terhadap program.<sup>54</sup>

#### 4. Ekonomi Syariah

##### a. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai fallah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam Al-qur'an dan sunnah.<sup>55</sup> Penggunaan istilah ekonomi syariah dan ekonomi Islam merupakan hal yang sama dan tidak perlu dibedakan.

Pengertian ekonomi syariah menurut M. Umer Chapra mengungkapkan bahwa sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa

---

<sup>54</sup> Ahmad Abdurrahman Wahid dkk, "Problematika Implementasi Program Kartu tani di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bonang Kabupaten Demak," *Jurnal Ekonomi dan Agribisnis*, No. 3, (2021): 12.

<sup>55</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT.Raja Garfindo Persada, 2013), 19.

ketidakseimbangan lingkungan.<sup>56</sup> Sedangkan menurut Muhammad Abdul Manan menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>57</sup> Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi syariah merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.

#### b. Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut Imam Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara' (maqashid al-syari'ah). Untuk mencapai tujuan syara' (maqashid al-syari'ah) agar dapat terealisasinya kemaslahatan, beliau menjelaskan tentang sumber-sumber kesejahteraan yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>58</sup>

Dalam ajaran agama Islam kesejahteraan di istilahkan sebagai falah, yang memiliki arti kesuksesan, kemuliaan, dan kemenangan. Falah dapat terwujud apabila kebutuhankebutuhan manusia terpenuhi secara seimbang. Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi, kesejahteraan merupakan bagian dari rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh agama Islam. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya.<sup>59</sup>

Sistem ekonomi yang dimiliki Islam saat ini mengutamakan kesejahteraan sesama manusia. Islam berakar pada hukum Syariah, yang membentuk pandangan dunia dan tujuan yang berbeda dibandingkan dengan sistem sekuler saat ini. Tujuan Islam yang diinginkan tidak bersifat materialistis, melainkan berdasarkan konsep Islam tentang kebahagiaan

---

<sup>56</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta, 2006), 16.

<sup>57</sup> Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice* (India: Idarah Adabiyah, 1980), 3.

<sup>58</sup> Didi Suardi, "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandangan Ekonomi Islam," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, No. 2, (2021): 321.

<sup>59</sup> Dahliana Sukmasari, "Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Of Qur'an Hadis Studies*, No. 1, (2020): 14.

manusia, keadilan sosial-ekonomi, dan pemenuhan spiritual.  
60

Beberapa faktor yang menjadi pendorong untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat ataupun keluarga yang sejahtera dalam konteks Islam adalah memenuhi kebutuhan bukan kepuasan atau keinginan. Hal tersebut merupakan tujuan dari aktivitas ekonomi syariah, dalam usaha mewujudkannya merupakan salah satu kewajiban dalam agama. Tujuan dari aktivitas ekonomi yang sempurna menurut Islam antara lain:

- a. Memenuhi kebutuhan seseorang secara sederhana
- b. Memenuhi kebutuhan keluarga
- c. Memenuhi kebutuhan jangka panjang
- d. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan
- e. Memberi bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah SWT.<sup>61</sup>

Kesejahteraan ekonomi merupakan hasil kerja dari seluruh elemen baik masyarakat maupun pemerintah. Begitu juga dengan mewujudkan keadilan distribusi, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja namun juga merupakan kewajiban masyarakat untuk mewujudkannya. Hal tersebut dapat di dilakukan dengan menyadari bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tergantung pada orang lain, sehingga tidak selalu mementingkan kepentingan pribadinya, tetapi juga untuk kepentingan orang lain dan saling melengkapi.<sup>62</sup>

Semua pemenuhan kebutuhan dalam konsep tercapainya kemaslahatan atau kesejahteraan akan menjamin generasi sekarang dan yang akan datang. Kedamaian, kenyamanan, sehat, dan efisien serta mampu memberikan kontribusi secara baik agar tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat (falah) dan kehidupan yang baik dan terhormat (alhayah al-thayyibah). Maka dapat dipaparkan dampak positif tercapainya kesejahteraan sebagai berikut:

- a. Kesadaran untuk syukur nikmat, lebih dekat kepada Allah Swt dengan peningkatan kualitas ibadah.
- b. Tercukupinya semua kebutuhan hidup.

---

<sup>60</sup> Johan Afandi, "Analisis Platform Microstock: Peluang Untuk Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, No.01 (2023): 111.

<sup>61</sup> Muhammad Nejatullah Sidiqqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam, Terjemahan Anas Sidik Dari Judul Aslinya The Economic Enterprise in Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), 15.

<sup>62</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 96–97.

- c. Menimbulkan kesadaran untuk berbagi sebagian rizki dari Allah Swt dalam bentuk, zakat, infaq, shadaqah dan lain-lain.
- d. Terwujudnya ketenangan jiwa.
- e. Mampu mencapai kesehatan lahir dan batin.<sup>63</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Mufidah, Indah Prabawati dengan judul *“Impelementasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani Di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo”* menunjukkan bahwa penerapan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani masih belum memenuhi ukuran keberhasilan. Hal ini dibuktikan dengan temuan di lapangan yaitu pemegang Kartu Tani sekaligus pemilik warung masih menggunakan mekanisme lama penebusan pupuk bersubsidi karena beberapa kendala seperti Kartu Tani masih berstatus tidak aktif, mesin EDC belum bisa membaca alokasi pupuk bersubsidi, dan beberapa petani merasakan mekanisme penebusan baru pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani lebih rumit sehingga tujuan dari program distribusi pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani masih belum tercapai. Namun, mekanisme baru dari RDKK berbasis elektronik yang merupakan langkah awal program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu Tani cukup membantu pelaksana program dalam hal penyesuaian dan pemantauan data. Persamaannya sama-sama membahas mengenai kartu tani sedangkan perbedaannya ialah pada penelitian ini fokus kepada distribusi pupuk sedangkan penelitian saya lebih membahas mengenai peran kartu tani itu sendiri.<sup>64</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Andaru Hardiannursholeh, Tutut Suryaningsih (2022) dengan Judul *“Analisis Efektifitas Dan Dampak Pengadaan Kartu Tani Di Desa Karangonom kecamatan Kauman Kabupaben Tulungagung”* Kartu tani merupakan wujud dari strategi pengendalian pemerintah terhadap Pupuk bersubsidi, tingkat efektivitas program kartu tani di Desa Karanganom masih rendah. Selain itu, fasilitas pelaksanaannya berupa pupuk bersubsidi belum di sediakan sehingga kartu tidak dapat digunakan. Sampai saat ini dampak yang dirasakan petani masih negatif karena kartu tersebut masih belum bisa berfungsi, petani merasa ribet dan

---

<sup>63</sup> M Umar Chapra, *Toward A Jus Monetary System, Alih Bahasa Ikhwani Abiding Basri, Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) 8-9.

<sup>64</sup> Nur Mufidah, Indah Prabawati, *Implementasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani Di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo*, 8.

bingung dengan kartu tani ini. Persamaannya sama-sama membahas mengenai peran diadakannya program kartu tani. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian saya menambah konteks perspektif ekonomi syariah.<sup>65</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Sholeh Kurniadini, Abdul Wahab Fahrub (2022) dengan judul “*Analisis Bisnis Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Tinjau Dari Ekonomi Islam Di Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal*” Pupuk subsidi adalah salah satu kebijakannya pemerintah untuk membantu petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Namun dalam praktiknya penyaluran pupuk bersubsidi masih mengalami kesenjangan. Di mana penyalurannya masih belum tepat sasaran bahkan mengalami kebocoran yang mengakibatkan kelangkaan. Jika dilihat dari segi ekonomi Islam, terkait pelaksanaan pendistribusian pupuk subsidi dapat dikatakan belum dilaksanakan Sehat. Karena dalam Islam, distribusi harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan. Tidak hanya itu, Islam Itu juga melarang hal-hal yang bisa menghalangi cara pendistribusiannya, salah satunya adalah penimbunan. Persamaannya sama-sama menjelaskan dalam perspektif syariah, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya antara membahas mengenai distribusi pupuk subsidi dengan peran kartu tani.<sup>66</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuningsih dengan judul “*Efektifitas Pendayagunaan Kartu Tani Dalam Penyaluran Pupuk Petani Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Di Kabupaten Pinrang (Perspektif Ekonomi Syariah)*”. Kartu tani di Desa Padakkalawa belum dapat dikatakan tepat sasaran dalam memberikan layanan perbankan bagi masyarakat petani, hal ini dibuktikan bahwa masih terdapat masyarakat tidak mendapatkan manfaat program kartu tani. Pendayaan program kartu tani dilihat dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam belum sepenuhnya adil, karena ketepatan sasaran penggunaan kartu tani belum sepenuhnya terpenuhi. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pengadaan program kartu tani yang bertujuan mensejahterakan petani. Sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih membahas mengenai efektif apa tidaknya program kartu tani

---

<sup>65</sup> Andaru Hardiannursholeh, Tutut Suryaningsih, “Analisis Efektifitas Dan Dampak Pengadaan Kartu Tani Di Desa Karanganom Kecamatan Kauman Kabupaben Tulungagung,” *Jupeko (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, (2022): 91.

<sup>66</sup> Sholeh Kurniadini, Abdul Wahab Fahrub “Analisis Bisnis Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Tinjau dari Ekonomi Islam Di Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal,” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, (2022): 10.

ini sedangkan penelitian saya membahas mengenai peran kartu tani.<sup>67</sup>

Penelitian yang dilakukan Akrim Mufadiyah dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Kelompok Tani Lestari 1 di Desa Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan). Dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan dalam pandangan Ekonomi Islam dilihat dari prinsip-prinsip Ekonomi Islam yaitu prinsip tauhid, prinsip bekerja dan produktifitas, prinsip masalah, dan prinsip ta’awun (tolong menolong) bahwa pemberdayaan masyarakat pada anggota kelompok tani lestari 1 telah sesuai dengan aturan-aturan atau batasan-batasan dalam Islam yang telah ditentukan oleh Allah Swt agar mencapai falah di dunia dan di akhirat. Sedangkan untuk kesejahteraan masyarakat anggota kelompok tani lestari 1 telah sesuai dengan kesejahteraan dalam pandangan Ekonomi Islam. Persamaannya membahas mengenai pandangan ekonomi Islam yang berupa kesejahteraan petani. Sedangkan perbedaannya penelitian ini hanya membahas mengenai kelompok tani saja sedangkan penelitian saya membahas mengenai peran kartu tani.<sup>68</sup>

### C. Kerangka Berpikir

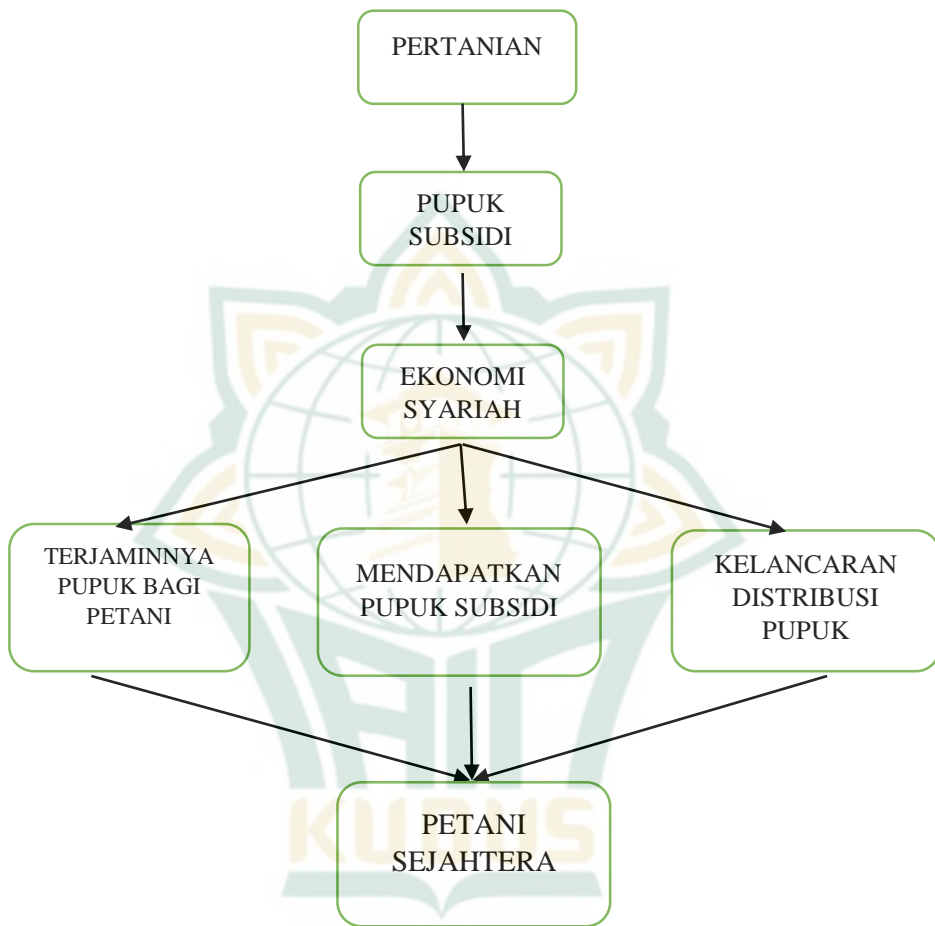
Kerangka penelitian dirancang sedemikian rupa sehingga penelitian menjadi lebih mudah dipahami dan lebih sistematis. Kerangka berpikir dapat menunjukkan alur jalannya penelitian yang sesuai dengan tujuan dan judul yang diangkat.

---

<sup>67</sup> Sri Wahyuningsih, Skripsi: *Efektifitas Pendayagunaan Kartu Tani Dalam Penyaluran Pupuk Petani Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Di Kabupaten Pinrang (Perspektif Ekonomi Syariah)*, (Parepare, IAIN Parepare, 2023).

<sup>68</sup> Akrim Mufadiyah, *Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Tani Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Kelompok Tani Lestari 1 di Desa Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan)*, (Lampung, UIN Raden Intan, 2019).

Daftar gambar 2.1 kerangka berpikir





**D. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana peran kartu tani saat ini?
2. Apakah dalam proses transaksi pupuk subsidi harus menggunakan kartu tani?
3. Apa saja manfaat yang dirasakan dengan adanya program kartu tani?
4. Apa saja kendala yang dirasakan mengenai program kartu tani?
5. Bagaimana cara untuk mendapatkan kartu tani?
6. Apakah program kartu tani ini sudah membuat petani sejahtera?
7. Apakah adanya program kartu tani sudah memudahkan petani untuk mendapatkan pupuk subsidi?
8. Bagaimana tanggapan bapak mengenai kebijakan subsidi pupuk subsidi saat ini?
9. Apakah alokasi pupuk subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah cukup terhadap satu musim tanam?
10. Bagaimana cara bapak dalam menangani kelangkaan pupuk subsidi yang ada di lapangan?
11. Apa harapan kedepannya terhadap program kartu tani?
12. Apakah ada aspek-aspek dalam kartu tani yang dapat meningkatkan distribusi kekayaan secara adil?
13. Apakah kartu tani dapat membantu dalam melindungi harta (mal) petani?